

# Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

*Determinants of Employment in Maluku*

Teddy Christiano Leasiwal  
Yenni Selanno

**Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah  
Pada SKPD Provinsi Maluku**

Elna M. Pattinaja

**Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit “BR” di Kota Ambon**

Lilian S. Loppies

**Analisis Kelayakan Investasi Budidaya Rumput Laut di Wilayah KAPET Seram**

Johanis Darwin Borolla

**Komoditas Unggulan dan Prospek Pengembangannya  
di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)**

Shirley Fredriksz

**Pengaruh Produksi Padi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  
Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru**

Ummi Duwila

**Pengaruh Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap  
Keterandalan Pelaporan Keuangan  
(Studi Pada UKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon)**

James Pelupessy

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktural Terhadap  
Kesempatan Kerja di Indonesia**

Ramla Dula Saleh

**Keunggulan Sektor dan Pergeseran Struktur Ekonomi  
di Kabupaten Maluku Barat Daya**

Vera Paulin Kay

**Pengaruh Dimensi Kolaborasi *Supply Chain* Terhadap Kepercayaan Antar-Organisasi  
Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Operasi**

Zainuddin Latuconsina

**Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Kontribusi Sektor Perkebunan Serta  
Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Maluku**

Abdul Azis Laitupa

**Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan  
Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Maluku**

Terezia V. Pattimahu

CE	Vol. IX	No. 2	Halaman 106 - 211	Ambon Desember 2015	ISSN 1978-3612
----	---------	-------	----------------------	------------------------	-------------------

## KEUNGGULAN SEKTOR DAN PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

**Vera Paulin Kay**

Politeknik Negeri Ambon

Jl. Ir. M. Putuhena Wailela Rumah Tiga – Ambon

### **ABSTRACT**

*As a district that is active in the construction and development of the region, the identification of the sector is a necessary condition that needs to be done to recognize the strength of the ability to be developed into a local basis. This study was conducted to identify which sector is a basic sector in Southwest Maluku district and whether the economic development that has resulted in a shift in the economic structure.*

*The analytical method used in this research is the location quotient (LQ) to see which sectors that are leading sectors and shift share (SS) to see if there was a shift in the development of regional economic structures.*

*The analysis showed that in year 2014 there were four leading sectors in Southwest Maluku district, namely agriculture, mining and quarrying, electricity and gas procurement, construction and wholesale and retail trade. SS index value indicates that there is a shift in the economic structure of Southwest Maluku district, where in 2010-2011 the growth effect Southwest Maluku district is smaller but in the period of 2013-2014 the growth effect of Southwest Maluku district increases and larger than the province.*

**Keywords:** *economic growth, a sector basis, a shift in the economic structure.*

### **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah (Depdagri, 2007), merupakan bagian dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya membangun manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan pembangunan daerah dimaksud sebagai usaha pemerataan dan perluasan pembangunan dalam rangka mencapai keserasian, keseimbangan, serta integrasi seluruh kegiatan. Pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia merupakan masalah yang umumnya dihadapi oleh sebagian besar daerah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerahnya, karena faktor-faktor tersebut merupakan penggerak utama (*prime mover*) laju pembangunan di suatu daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada membentuk suatu pola kemitraan antara daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

dalam wilayah tersebut. Dengan tujuan utama untuk menciptakan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat, maka keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tergantung dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sumber daya fisik secara lokal untuk inisiatif pembangunan di wilayah yang bersangkutan (Arsyad, 2004).

Suatu perencanaan pembangunan ekonomi diperlukan penentuan kegiatan-kegiatan di antara sektor-sektor perekonomian. Pada dasarnya masing-masing sektor tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan. Kemajuan suatu sektor tidak akan terlepas dari dukungan yang akan diberikan oleh sektor lainnya sehingga sebenarnya keterkaitan antar sektor ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan seluruh sektor yang terdapat dalam perekonomian. Dengan melihat keterkaitan antar sektor dan memperhatikan efisiensi dan efektivitas yang hendak dicapai dalam pembangunan, maka sektor yang mempunyai keterkaitan tinggi dengan banyak sektor pada dasarnya merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian lebih (Nazara, 2009).

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sebagai kabupaten yang terus mengalami proses pembangunan ke arah yang lebih baik, maka pembangunan di arahkan pada sektor-sektor yang dapat memacu pembangunan ekonomi daerah secara

langsung dan memiliki kaitan yang erat dengan pengembangan sektor lainnya baik itu keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun kaitan ke depan (*forward linkage*). Pembangunan daerah dengan mengabaikan keterkaitan antar sektor akan menghambat laju pertumbuhan perekonomian daerah secara keseluruhan, terutama bila daerah tersebut

masih dalam tahap-tahap pembangunan yang berkelanjutan. Keterkaitan antar sektor di Kabupaten MBD mutlak diperlukan, dengan menghilangkan ego-sektoral yang ada dengan mengintegrasikan keterkaitan sektor. Berikut ini dapat dilihat perkembangan laju pertumbuhan sektoral di Kabupaten MBD tahun 2013-2014.

**Tabel 1.** Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013-2014

Sektor Ekonomi	Tahun	
	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,03	6,92
Pertambangan dan Penggalian	6,90	564,08
Industri Pengolahan	6,36	8,86
Pengadaan Listrik dan Gas	2,55	39,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,51	4,98
Konstruksi	9,28	7,80
Perdagangan Besar & Eceran	8,10	8,86
Transportasi dan Pergudangan	5,87	8,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,48	2,52
Informasi dan Komunikasi	5,01	5,91
Jasa Keuangan & Asuransi	9,34	6,14
Real Estatel	4,82	6,42
Jasa Perusahaan	6,64	4,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	7,70	5,90
Jasa Pendidikan	6,52	9,75
Jasa Kesehatan & Sosial	0,42	2,69
Jasa Lainnya	0,15	4,93

Sumber : PDRB Kab. MBD Tahun 2010-2014

Tabel 1 di atas menunjukkan perkembangan perekonomian sektoral Kabupaten MBD, terlihat bahwa perkembangan sector ekonomi terbesar berasal dari pertambangan dan penggalian yang meningkat sangat tajam hingga mencapai 564,08% pada tahun 2014. Sector yang mengalami pertumbuhan tinggi yakni sector pengadaan listrik dan gas yakni mencapai 39,86% pada tahun 2014, mengingat kondisi geografis yang berpulau-pulau dan akses transportasi yang terbilang masih terbatas maka pengadaan listrik dan gas termasuk urgent dalam memenuhi permintaan masyarakat. Sementara sektor-sektor dengan laju pertumbuhan yang cukup besar dan cenderung memiliki besaran yang hamper sama, yakni jasa pendidikan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan yakni sektor konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi serta jasa keuangan. Perkembangan sektoral yang cenderung tidak memperhatikan keterkaitan akan sangat menghambat pembangunan daerah.

Jumlah penduduk yang bekerja dalam sector perekonomian yang tertinggi adalah sector pertanian yakni mencapai 41,53% dari jumlah penduduk kabupaten, peringkat kedua adalah sector konstruksi yakni sebesar 9,20% dimana peningkatan terjadi pada dua tahun belakangan yang disebabkan hasil temuan potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini.

Sehingga pertanyaan penelitian yang menjadi fokus untuk dijawab adalah

1. Sektor manakah yang merupakan sector basis di Kabupaten Maluku Barat Daya?
2. Apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Maluku Barat Daya?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sector manakah yang merupakan sector basis, apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi dan bagaimana skenario yang tepat untuk dikembangkan sehingga sector basis dapat memiliki keterkaitan yang efisiensi dan ekonomis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pembangunan Ekonomi Regional

Todaro dalam Sirojuzilam (2008), mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Menurut Adisasmita (2008), pembangunan wilayah (*regional*) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem *spasial* suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.

Menurut Glasson (1977), pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu *endogen* ataupun *eksogen*, yaitu faktor-faktor yang terdapat didalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor diluar daerah atau kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu *eksogen* adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Perubahan sistem pemerintahan menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah dan sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam telah berubah menjadi lebih bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dihadapi di daerah. Penetapan kebijaksanaan yang sebelumnya hanya sebagai pendukung kebijaksanaan nasional telah mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah. Kondisi ini juga memicu persaingan antar daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Richardson (2001), perbedaan pokok antar analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang di titik beratkan dalam analisis tersebut adalah perpindahan faktor (*factors movement*). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja

dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan *absolute* kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan (Sirojuzilam, 2008).

Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari perekonomian wilayahnya. Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah.

### Perencanaan Pembangunan Wilayah

Menurut Arsyad (2004), Fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah :

1. Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi.

Perencanaan pembangunan regional merupakan suatu identitas ekonomi dengan unsur-unsur interaksi yang beragam. Aktivitas ekonomi wilayah didentifikasi berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu dievaluasi secara komparatif dan kolektif terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi skala wilayah.

Nugroho dalam Sirojuzilam (2008), menyatakan bahwa pendekatan perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-instansi dipusat dalam melihat aspek ruang disuatu daerah. Artinya bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan *disparitas* antar wilayah, maka pendekatan perencanaan *parsial* adalah sangat penting untuk diperhatikan. Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif, pendekatan perencanaan, sehingga potensi sumber daya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan public guna

mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

### Perkembangan Wilayah

Wilayah dapat diartikan suatu ruang geografis dengan fungsi atau batasan administrasi tertentu, ditinjau dari fungsional suatu wilayah, wilayah merupakan suatu sistem kompleks, terdiri dari sistem ekonomi, sistem ekologi, sistem sosial politik (Blair dalam Abdurrahman, 2005). Miraza (2005b), wilayah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia serta posisi geografis, dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif melalui perencanaan yang komprehensif. Secara normatif, wilayah juga didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional (Undang-Undang Penataan Ruang No.26, 2007).

Adapun pemekaran wilayah merupakan wujud implementasi otonomi daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk membentuk suatu kabupaten/kota yang baru, terpisah dan tidak berhierarki dengan kabupaten induk, sedangkan wilayah kecamatan merupakan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan dipimpin oleh kepala kecamatan (Undang-Undang Otonomi Daerah No.32, 2004).

Dalam hal ini, kabupaten merupakan daerah otonom dan terdiri dari beberapa kecamatan sebagai perangkat perwilayahan. Perkembangan ekonomi adalah perbaikan terhadap kesejahteraan material yang terus menerus dan berjangka panjang, dapat dilihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa (Okun dan Richardson dalam Jhingan, 2010), sedangkan perkembangan suatu wilayah merupakan integral pertumbuhan setiap sistem yang terdiri dari sosial, ekonomi, infrastruktur, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah (Riyadi, 2002). Perkembangan wilayah menurut Schumpeter dalam (Jhingan, 2010) adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, dimana dapat diasumsikan bahwa indikator perkembangan wilayah dapat ditinjau dari perkembangan aspek ekonomi, sosial dan infrastruktur.

Kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat perkembangan suatu daerah adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan

kebutuhan kehidupannya, baik berupa kebutuhan hidup maupun kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha. Pemakaian kriteria pendapatan daerah perkapita sangat sulit untuk mencari keterkaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, karena belum dapat memberikan gambaran memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat, dimana pendapatan tinggi belum berarti merupakan suatu jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya.

Menurut Hill dan Williams dalam (Huzain, 2008), untuk memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan wilayah, diperlukan cukup banyak variabel dan variabel – variabel tersebut berfungsi untuk menilai suatu daerah. Berkaitan dengan analisis variabel-variabel ekonomi perlu ditambahkan indikator-indikator yang mengacu pada Kebutuhan Fisik Minimum (*Minimum Physical Needs*), yang terdiri dari tiga area kunci indikator-indikator sosial yang mempengaruhi nilai perkembangan suatu daerah yaitu kesehatan, kemiskinan dan pendidikan.

### Teori Basis Ekonomi

Menurut Arsyad (2004), mengemukakan bahwa teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri dengan menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja (*job creation*) dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja dalam jangka panjang.

Selanjutnya dikemukakan bahwa teori basis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi regional (daerah) sangat tergantung dari permintaan luar daerah akan produk-produk daerah tersebut. Lebih jelas dikatakan bahwa pertumbuhan atau penurunan perekonomian suatu daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam mengekspor keluar daerah tersebut. Ekspor tersebut baik dalam bentuk barang maupun jasa termasuk tenaga kerja. Industri yang melakukan kegiatan ekspor disebut *sektor basis*. Apabila permintaan akan barang dan jasa meningkat (ekspor), dari daerah maka sektor basis akan berkembang dan pada gilirannya nanti perkembangan ini akan mendorong tumbuhnya sektor-sektor non basis. Dengan demikian akan terjadi peningkatan pendapatan, investasi, konsumsi dan kemampuan kerja di dalam daerah

### Pergeseran Struktur Ekonomi

Pada dasarnya teori-teori tentang pergeseran struktur ekonomi menjelaskan fenomena terjadi perubahan struktur di Negara Sedang Berkembang yang didominasi kegiatan perekonomian pedesaan



bergerak menuju kepada kegiatan perekonomian dan berorientasi ke perekonomian perkotaan dalam bentuk industri maupun jasa. Secara umum pergeseran struktur ekonomi ditandai oleh peralihan dan pergeseran kegiatan perekonomian dari sektor produksi primer (pertanian) menuju sektor produksi sekunder (industri, manufaktur, konstruksi) dan sektor tersier (jasa-jasa)

Menurut Emerson dan Lamhear (1975), bahwa pertumbuhan atau pergeseran struktur ekonomi tergantung pada bagaimana kecepatan pergeseran sumberdaya dari kegiatan pertanian, kegiatan industri dan kegiatan jasa. Dengan kata lain, bahwa pergeseran kegiatan ekonomi tersebut terjadi adanya pengaruh kekuatan penawaran dan permintaan, sehingga terdapat tingkat produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi.

Kuznets (dalam Sukirno 1985), mengemukakan bahwa, terjadinya pergeseran struktur ekonomi dalam proses pembangunan bukan hanya karena adanya perubahan persentasi penduduk yang bekerja di berbagai sektor dan sub sektor dalam pembangunan ekonomi, tetapi karena adanya perubahan kontribusi berbagai sektor ekonomi kepada produk nasional dalam proses tersebut. Kuznets menyimpulkan bahwa terjadi perubahan sumbangan sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa-jasa terhadap produksi nasional. Corak perubahan tersebut di antaranya : (1) kontribusi sektor pertanian terhadap produk nasional menurun, (2) kontribusi sektor industri terhadap produk nasional meningkat, (3) kontribusi sektor jasa-jasa terhadap produk nasional tidak mengalami perubahan berarti dan perubahan itu tidak konsisten sifatnya.

Djojohadikusumo (1994), mengatakan struktur perekonomian dapat dibedakan atas dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan sektor basis (*basic activities*) adalah kegiatan sektor ekonomi dengan mengeksport barang-barang dan jasa ke tempat lain di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, dalam arti bahwa sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain. Dengan kata lain sektor ini dikatakan sebagai sektor unggulan, sedangkan sektor non basis (*non basic activities*) yaitu kegiatan sektor ekonomi yang hanya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor ini dikenal dengan sektor non unggulan.

Pengertian tentang pergeseran struktur ekonomi tentunya harus dipahami secara jernih dengan menggunakan konsep-konsep primer, sekunder dan tersier. Pergeseran struktur ekonomi dapat dipahami

dari proses perubahan kegiatan ekonomi tradisional kerah ekonomi moderen, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dan dari ketergantungan kepada kemandirian.

### Konsep Pengembangan Ekonomi Wilayah

Menurut Tukiyat dalam Ambardi dan Prihawantoro (2002), pengembangan ekonomi wilayah adalah suatu usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan interdependensi dan interaksi antara sistem ekonomi (*economy system*), sistem masyarakat (*sosial system*), dan lingkungan hidup (*environment*), serta sumber daya alam (*ecosystem*). Konsep pengembangan ekonomi wilayah selain dapat menjamin keserasian pengembangan antar daerah, juga menjembatani hubungan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Tujuan pengembangan ekonomi wilayah adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas regional. Dalam ekonomi wilayah terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan (Tukiyat dalam Ambardi dan Prihawantoro, 2002):

- a.) Sumberdaya: meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, semuanya merupakan kekuatan bagi wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Analisis sumberdaya ekonomi wilayah difokuskan pada pemanfaatan sumberdaya yang lebih optimal, sedangkan analisis sumberdaya manusia pada potensi/kemampuan kreativitas dan inovasi ditentukan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan.
- b.) Lokasi: pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh wilayah tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan mutunya tetapi juga oleh lokasi dan sistem tata ruang. Tingkat efisiensi suatu kegiatan ditentukan oleh posisi relatif lokasi lainnya seperti permukiman sebagai pemasok tenaga kerja, transportasi, dan sarana pelayanan.
- c.) Ekonomi Wilayah: pertumbuhan ekonomi wilayah sangat ditentukan oleh keragaman dan besarnya inovasi, ekonomi, pengenalan, penciptaan, pemanfaatan keunggulan kompetitif, tingkat perkembangan struktur perekonomian wilayah dan kemampuan meramal mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi persaingan sempurna, suatu wilayah akan menspesialisasikan diri pada kegiatan dimana sumberdaya wilayah memiliki keunggulan kompetitif. Spesialisasi wilayah akan mendorong perdagangan antar wilayah, pada gilirannya mampu memberikan pertumbuhan ekonomi wilayah lebih lanjut secara efektif dan efisien.
- d.) Kelembagaan: peranan kelembagaan pada pengembangan ekonomi wilayah menyangkut

bukan hanya organisasi, tetapi juga tata nilai dan norma perilaku di dalam pembangunan. Efisiensi dan efektivitas dalam distribusi hasil-hasil pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh *performance* (kinerja) kelembagaan seperti pemerintah dan masyarakat lainnya.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan periode waktu 2010-2014, daerah yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

#### Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data monografi Kabupaten MBD periode 5 tahun disertai data lain untuk melengkapinya antara lain : Kabupaten MBD dalam Angka Dalam Angka, Provinsi Maluku Dalam Angka, PDRB Kabupaten MBD, RPJM/RPJD Kabupaten MBD, RTRW Kabupaten MBD.

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis datanya, untuk data primer dilakukan dengan melalui wawancara dan metode survei. Sementara untuk data sekunder, data dikumpulkan dari berbagai sumber data resmi dan produk-produk lain yang dikeluarkan oleh berbagai instansi dan berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber studi pustaka dan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini (Soeratna dan Arsyad, 1998).

#### Metode Analisis Data

##### Location Quotient (LQ)

Untuk menentukan sektor-sektor basis digunakan analisis *Location Quotient* (LQ) sebagai berikut (Kuncoro : 2000).

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} = \frac{v_i/V_i}{v_t/V_t}$$

Keterangan :

- $v_i$  = PDRB sektor  $i$  di Kab. Maluku Barat Daya
- $V_i$  = PDRB sektor  $i$  di Provinsi Maluku
- $v_t$  = PDRB total Kab. Maluku Barat Daya
- $V_t$  = PDRB total Provinsi Maluku

##### Kriteria Pengujian

- a) Nilai  $LQ > 1$  berarti bahwa sektor tersebut mengalami surplus dan dapat mengekspor hasil produksi ke daerah lain.
- b) Nilai  $LQ < 1$  berarti sektor tersebut mengalami domestik dan bukan merupakan sektor yang menjadi basis di daerah bersangkutan.

- c) Nilai  $LQ = 1$  Berarti penduduk di daerah tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang dengan hasil industri sendiri.

##### Shift Share (SS)

Model/analisis SS (*Shift Share*) digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah/wilayah/kecamatan dibanding dengan perekonomian di atasnya.

Teknik SS digunakan untuk menunjuk dan menemukan sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah/ kawasan dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di atasnya. Di samping itu, juga digunakan untuk menggambarkan kinerja (*performance*) sektor-sektor di suatu kawasan/wilayah dibanding dengan kinerja perekonomian di atasnya. Dengan kata lain, SS digunakan untuk menunjuk dan menemukan pergeseran (*shift*) terhadap hasil pembangunan perekonomian suatu daerah bila daerah tersebut memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian di atasnya. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu kawasan/wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian di atasnya serta sector sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan tersebut.

Teknik SS, membagi perubahan pertumbuhan ( $D_{ij}$ ); menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi di atasnya ( $N_{ij}$ ), diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan;
2. Pergeseran proporsional atau bauran industri ( $M_{ij}$ ), mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada daerah studi dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar dan dijadikan acuan, dimana melalui pengukuran ini dimungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah studi terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan; serta
3. Pergeseran diferensial atau keunggulan kompetitif ( $C_{ij}$ ), menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan, dimana jika pergeseran diferensial dari suatu sektor adalah positif, maka sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang sektor yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Secara matematis, dirumuskan sebagai berikut (Mulyanto, 2007):

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

$D_{ij}$  : Perubahan Pertumbuhan Ekonomi (*Shift Share*) pada Wilayah Studi. Bila analisis ini diterapkan pada nilai tambah (VA: *Value Added*) sektor-sektor pembentuk PDRB, maka:

$$D_{ij} = VA_{ij}(t+n) - VA_{ij}(t) \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

$VA_{ij}(t+n)$  : Nilai Tambah sektor  $i$  di daerah studi atau di kecamatan  $j$  pada tahun  $t+n$ .

$VA_{ij}(t)$  : Nilai Tambah sektor  $i$  di daerah studi atau di kecamatan  $j$  pada tahun  $t$ .

$N_{ij}$  : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah yang Lebih Tinggi atau Wilayah Referensi (Pengaruh Pangsa) atau Pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten MBD, yang dirumuskan:

$$N_{ij} = VA_{ij}(t) \cdot m \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

$$m = (VA_{n(t+n)} - VA_{n(t)}) / VA_{n(t)}$$

$VA_{n(t+n)}$  : PDRB di wilayah referensi atau PDRB Kabupaten MBD pada tahun  $t+n$ .

$VA_{n(t)}$  : PDRB di wilayah referensi atau PDRB Kabupaten MBD pada tahun  $t$ .

$M_{ij}$  : Pergeseran Proporsional atau Pengaruh Bauran Industri/ Komposisi Besar.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu angka indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktifitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Hasil analisis LQ di Kabupaten MBD pada tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan nilai LQ Kabupaten MBD, menunjukkan bahwa terdapat empat (4) sektor yang memiliki nilai LQ > 1, yakni sektor pertanian; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi, dan; sektor perdagangan besar dan eceran. Sementara sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan pada tahun 2011. Mengindikasikan bahwa tingkat spesialisasi sektor di Kabupaten MBD cukup baik dan meningkat dari tahun ke tahun serta lebih besar dibandingkan dengan tingkat provinsi, terutama sesudah pemekaran wilayah menjadi kabupaten.

**Tabel 2.** Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010-2014

SEKTOR	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.33	1.34	1.35	1.35	1.37
Pertambangan dan Penggalian	0.95	1.02	1.07	2.59	4.61
Industri Pengolahan	0.13	0.12	0.13	0.16	0.15
Pengadaan Listrik dan Gas	2.13	2.22	2.30	2.47	2.48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.93	0.89	0.92	0.92	0.92
Konstruksi	1.37	1.34	1.30	1.40	1.41
Perdagangan Besar & Eceran	2.01	2.01	2.03	2.03	2.04
Transportasi dan Pergudangan	0.65	0.62	0.66	0.68	0.69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.49	0.41	0.43	0.45	0.46
Informasi dan Komunikasi	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64
Jasa Keuangan & Asuransi	0.38	0.35	0.35	0.39	0.39
Real Estate	0.14	0.10	0.10	0.09	0.15
Jasa Perusahaan	0.27	0.31	0.33	0.34	0.37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	0.79	0.78	0.79	0.79	0.79
Jasa Pendidikan	0.53	0.53	0.55	0.56	0.59
Jasa Kesehatan & Sosial	0.34	0.37	0.41	0.46	0.51
Jasa Lainnya	0.61	0.60	0.61	0.64	0.63

Sumber: data diolah

Sektor pertanian adalah sektor yang sebagian besar merupakan mata pencaharian penduduk MBD dimana jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai 42 % dari total penduduk. Sementara sektor konstruksi dan sektor perdagangan perdagangan besar dan eceran juga merupakan sektor yang banyak menampung tenaga kerja. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2012

menjadi sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja.

##### Hasil Perhitungan *Shift Share* (SS)

Untuk menganalisis pergeseran struktur aktivitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan wilayah referensi (cakupan wilayah yang setingkat di atas) dalam dua titik waktu, dimana hasil ini menjelaskan



kemampuan berkompetensi aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan yang lebih luas. Berikut ini dapat dilihat hasil

perhitungan shift share Kabupaten MBD periode tahun 2010-2014 pada tabel 2 dan tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil Perhitungan *Shift Share* (SS) di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010-2011

Sektor Ekonomi	Komponen (Jt Rupiah).			
	N	M	C	D
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8940.06	-1682.89	-2090.37	5011.4
Pertambangan dan Penggalian	135.91	24.08	99.2	245.24
Industri Pengolahan	130.11	-51.52	-41.85	-316.61
Pengadaan Listrik dan Gas	98.82	-123.94	-66.72	-100.48
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	617.6	2274.97	1294.73	4059.53
Konstruksi	7534.39	252.66	-1208.61	6227.94
Perdagangan Besar & Eceran	370.35	51.5	-233.6	692.82
Transportasi dan Pergudangan	911.59	-389.28	-382.42	101.5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2499.05	500.04	-1365.14	2619.34
Informasi dan Komunikasi	189.93	122.78	476.82	41.55
Jasa Keuangan & Asuransi	170.26	15.97	94.62	904.21
Real Estate	121.4	0.14	10.33	101.5
Jasa Perusahaan	1076.68	340.37	675.95	713.4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	99.74	-39.49	-4367.55	324.81
Jasa Pendidikan	276.83	-347.19	-437.88	129.82
Jasa Kesehatan & Sosial	87.37	56.48	108.75	260.61
Jasa Lainnya	47.19	4.42	110.63	161.5
<b>Total</b>	<b>23307.28</b>	<b>1009.1</b>	<b>-7323.11</b>	<b>21178.08</b>

Sumber: data diolah

**Tabel 4.** Hasil Perhitungan *Shift Share* (SS) di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013-2014

Sektor Ekonomi	Komponen (Jt Rupiah).			
	N	M	C	D
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11381	-3750.15	-665.18	7438.38
Pertambangan dan Penggalian	477.83	273.25	156.11	1327.54
Industri Pengolahan	210.96	93.03	-21.5	-208.9
Pengadaan Listrik dan Gas	107.15	-66.16	-14.29	-89.3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1281.09	3278.24	1675.22	5523.74
Konstruksi	9683.16	1910.6	-746.36	10483.6
Perdagangan Besar & Eceran	481.77	-29.01	5996.39	1109.06
Transportasi dan Pergudangan	1157.33	-487.15	410.59	1510.96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3173.34	1106.97	3496.49	7132.48
Informasi dan Komunikasi	171.46	210.99	699.83	61.11
Jasa Keuangan & Asuransi	172.33	52.27	116.99	978.44
Real Estate	127.12	21.87	47.61	120.34
Jasa Perusahaan	1125.59	419.91	800.03	721.67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	109.68	-286.32	-3009.13	336.44
Jasa Pendidikan	288.31	-411.7	-416.01	120.03
Jasa Kesehatan & Sosial	89.1	106.22	212.07	277.28
Jasa Lainnya	44.37	34.55	200.01	181.32
<b>Total</b>	<b>30081.59</b>	<b>2477.41</b>	<b>8938.87</b>	<b>37024.19</b>

Sumber: data diolah

Nilai shift share di Kabupaten MBD dengan membandingkan dua titik waktu, yakni periode

penelitian dibagi dalam dua rentang waktu, yaitu 2010-2011 dan 2013-2014. Pada periode 2010-2011

efek pertumbuhan provinsi (23.307,28) lebih besar dari efek pertumbuhan absolut (21.178,08) artinya bahwa tingkat pertumbuhan Provinsi Maluku lebih besar dari tingkat pertumbuhan Kabupaten MBD, sementara pada periode waktu 2013-2014 menunjukkan dampak yang berbanding terbalik artinya pada periode ini efek pertumbuhan absolut (37.024,19) lebih besar dari efek pertumbuhan provinsi (30.081,59). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi yang berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi Kabupaten MBD.

Terjadi peningkatan efek bauran industri (M) pada perbandingan kedua periode waktu yang berarti bahwa distribusi industri atau sektoral di tingkat provinsi menyebabkan meningkatnya nilai PDRB Kabupaten MBD menjadi 2.477,41 dimana terdapat 11 sektor yang berkontribusi positif.

Efek persaingan (C) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa jauh daya saing suatu sektor di daerah (kabupaten) dibandingkan dengan sektor yang sama di daerah yang setingkat lebih tinggi (provinsi). Total daya saing pada periode 2010-2011 menunjukkan angka yang negatif artinya bahwa secara total daya saing yang dimiliki Kabupaten MBD lebih rendah dibandingkan dengan daya saing tingkat provinsi, pada periode berikutnya total daya saing yang dimiliki Kabupaten MBD meningkat dan bernilai positif artinya bahwa daya saing yang dimiliki Kabupaten MBD meningkat dan menjadi lebih tinggi dibanding daya saing provinsi.

Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan dua (2) periode waktu, diperoleh hasil bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pergeseran struktur ini terlihat dari periode 2010-2011 dimana efek pertumbuhan Kabupaten MBD yang lebih kecil dari efek pertumbuhan Provinsi Maluku, tetapi pada periode 2013-2014 efek pertumbuhan Kabupaten MBD menjadi lebih besar dari efek pertumbuhan Provinsi Maluku.

Sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap perubahan struktur ekonomi di Kabupaten MBD adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta beberapa sektor lainnya yang berkontribusi positif.

## V. PENUTUP

### a.) Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan dan analisis terhadap keunggulan sektor dan pergeseran struktur ekonomi,

maka penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Terdapat 4 sektor unggulan di Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi, dan; sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai  $LQ > 1$ .
2. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan pada tahun 2011, merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Sektor lain yang dapat dikembangkan adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang karena memiliki nilai  $LQ$  yang mendekati 1.
3. Terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Maluku barat Daya, dimana pada tahun 2010-2011 efek pertumbuhan Kabupaten MBD lebih kecil tetapi pada periode tahun 2013-2014 efek pertumbuhan Maluku Barat Daya meningkat dan lebih besar dibandingkan dengan provinsi.
4. Sektor yang berkembang cukup baik dalam pergeseran struktur ekonomi adalah sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran.

### b.) Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pemanfaatan sektor unggulan sebaiknya dilakukan secara terintegrasi dengan melihat *forward linkage* dan *backward linkage* sehingga dapat memacu perkembangan sektor secara menyeluruh.
2. Kerjasama antar instansi daerah atau SKPD sebaiknya menghilangkan ego-sektoral sehingga kemajuan daerah dengan berbagai keunggulan lokal dapat menjadi modal sosial pembangunan manusia dan daerah.
3. Sektor pertambangan dan penggalian dengan potensi alam yang sangat besar sebaiknya didukung dengan sumber daya manusia yang terdidik dan terampil serta jumlah yang memadai.

## REFERENSI

- Arsyad L, (2004). Ekonomi Pembangunan, Edisi ke-4, cet. ke-2, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (2015) Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Angka, beberapa edisi.

- Badan Pusat Statistik** (2015) Provinsi Maluku Dalam Angka, beberapa edisi.
- Djojohadikusumo S.** (1994). Perkembangan Potensi Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Jhingan ML,** (2000). The Economic of the Deveelopment ang Planning (terjemahan D.Guritno). Jakarta: CV Rajawali.
- Kuncoro Mudrajad,** (2006). Ekonomika Pembangunan Edisi Keempat (Teori, Masalah dan Kebijakan). Jogjakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Kuncoro. Mudrajad,** (2006). Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soeratna dan Lincoln Arsyad,** (1998). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, BPFE, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono,** (2004). Pengantar Teori Makro Ekonomi, edisi 3, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith** (2000). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- Williamson D. Stephen,** (2005). *Macroeconomics* 2<sup>nd</sup> Edition, Pearson Addison Wesley, University of Iowa.